

Sejarah dan Arsitektur Tradisional Jawa Pendopo Dipokusmo: Identitas Budaya Kabupaten Purbalingga

Karina Fadiya Kusuma¹, Sugeng Priyadi², Ipong Jazimah³
^{1,2,3}Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v24i.1566](https://doi.org/10.30595/pssh.v24i.1566)

Submitted:

June 14, 2025

Accepted:

July 06, 2025

Published:

July 23, 2025

Keywords:

Arsitektur Tradisional,
Pendopo Dipokusmo, Budaya
Lokal

ABSTRACT

Purbalingga sering dibaca sama dengan Probolinggo yang berada di Jawa Timur, sehingga kabupaten ini diganti menjadi Purbalingga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji Pendopo Dipokusmo sebagai representasi identitas budaya Masyarakat Purbalingga melalui pendekatan Sejarah dan arsitektur tradisional Jawa. Fokus utama penelitian ini yang pertama, menganalisis Sejarah perkembangan Pendopo Dipokusmo; Kedua, mengkaji bangunan arsitektur Jawa; Ketiga, menjelaskan fungsi Pendopo Dipokusmo identitas budaya lokal. Sedangkan metode yang digunakan metode Sejarah, melalui tahapan heuristic, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Pendopo Dipokusmo tidak hanya merupakan bangunan fisik warisan masa lalu, tetapi juga penanda identitas budaya, politik, dan sosial masyarakat Purbalingga. Struktur bangunan Pendopo Dipokusmo memiliki 2 bagian, diantaranya Bangunan Utama dan bangunan tambahan Pendopo Dipokusmo dan masyarakat Purbalingga saling terhubung, berfungsi sebagai ruang budaya dan pusat aktifitas sosial.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Karina Fadiya Kusuma

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kembaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53182

Email: karinaafadiya23@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Purbalingga adalah salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki ciri-ciri khusus yang mencakup kekayaan alam, budaya, dan pembangunan. Perkembangan Budaya di Purbalingga juga terlihat dari pendirian Museum Prof. Dr. Soegarda Poerbakawatja, yang telah berpotensi sejak tahun 2003 sebagai lokasi untuk melestarikan objek- objek sejarah daerah Purbalingga. Museum tersebut juga menjadi lambing komitmen pemerintah daerah dalam menjaga warisan budaya serta sejarah lokal (Sukma, 2017: 19).

Sebelum adanya pengaruh agama Hindu dan Budha, masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Jawa merupakan masyarakat yang sederhana dan teratur. tidak heran jika masyarakat zaman dulu menganut kepercayaan animisme dan dinamisme menjadi inti kebudayaan yang membentuk setiap aktivitas kehidupan masyarakat.

Dalam historiografi lokal, kabupaten Purbalingga sering dikaitkan dengan banyak peristiwa sejarah, seperti situs arkeologi, tradisi, dan perannya dalam perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. Mengenai religi orang Jawa, upacara religi mencerminkan sikap orang Jawa yang ambivalen dalam hal merayakan suatu peristiwa (Koentjaraningrat, 1984:103). Arsitektur tradisional Jawa mencerminkan kedalaman filosofi serta budaya masyarakat Jawa, yang tercermin dalam bentuk struktur bangunan, tata ruang, dan ornamen. Unsur kebudayaan

universal itu, merupakan isi dari semua kebudayaan yang ada di dunia ini Yaitu sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian hidup, sistem teknologi dan peralatan. Dari ke tujuh susunan urutan unsur kebudayaan dirancang dengan sengaja untuk menunjukkan unsur mana yang paling sulit berubah atau terkena pengaruh kebudayaan lain, serta unsur mana yang paling mudah diubah atau diganti dengan unsur-unsur dari kebudayaan lain (Koentjaraningrat, 1974: 3).

Di era modern, arsitektur tradisional Jawa masih terus beradaptasi. Banyak nilai-nilai tradisional yang sering dimasukkan kedalam desain modern untuk mencerminkan keseimbangan antara tradisi dan perkembangan zaman. Contohnya, elemen seperti atap joglo atau ornamen khas Jawa sering muncul dalam bangunan modern untuk mempertahankan identitas budaya. Namun, modernisasi juga menghadirkan tantangan bagi pelestarian kearifan lokal, terutama dengan meningkatkan penggunaan bahan-bahan modern yang dapat mengganggu keaslian desain tradisional Jawa.

Pada masa pemerintahan susuhunan Amangkuran II (Amangkura Amral) dari tahun 1677 hingga 1703 di Kartosuro Mataram, sebuah pemberontakan terjadi yang dipimpin oleh Kyai Wanakusuma bersama dua saudaranya, Joko Lelono dan Joko Puroso, serta para pengikutnya. Pemberontakan ini dilakukan sebagai bentuk yang dilakukan untuk menagih janji Ki Ageng Pemanahan kepada Ki Ageng Giring di masa lalu, yang menyatakan bahwa suatu ketika kekuasaan Mataram akan dialihkan kepada keturunan Ki Ageng Giring (Triatmo, 2008: 35).

Ki Arsayuda ditunjuk sebagai Patih Karanglewas 7 untuk membantu Raden Ngabehi Dipoyudo II. Namun, Raden Tumenggung Dipoyudo II tidak dapat memimpin Karanglewas dalam waktu yang lama karena kondisi kesehatannya yang memburuk, dan akhirnya ia meninggal dunia. Sebagai penggantinya, Ki Arsayuda dilantik menjadi Raden Tumenggung Dipoyudo III. Atas arahan Ki Arsanaka, Pusat pemerintahan yang sebelumnya berada di Karanglewas dipindahkan ke Desa Purbalingga, yang dianggap lebih strategis dan subur. Sejak saat itu, Purbalingga sudah lepas dari Banyumas dan menjadi Kabupaten sendiri yang sederajat langsung berada dibawah pemerintahan pusat di Surakarta (Triatmo, 2008: 43).

Pendopo Dipokusumo adalah simbol dari nilai-nilai budaya yang ada dalam kehidupan masyarakat. Bangunan pendopo memiliki peranan yang penting dalam aktivitas harian masyarakat setempat. Arsitektur tradisional Jawa, khususnya pendopo Dipokusumo, merupakan elemen penting yang mewakili identitas budaya Kabupaten Purbalingga. yang dimana elemen khas dalam arsitektur Jawa, pendopo tidak hanya tempat pertemuan dan upacara sejenis.

1.1 Arsitektur

Arsitektur dalam keberadaan secara umum dapat dipahami beragam, berbagai definisi tentang arsitektur telah banyak dipublikasikan, dimana dari berbagai definisi tersebut tentu dapat disimpulkan sesuai dengan paradigma kita melihat dan memahaminya (Rengkung, 2011: 14).

Setiap bangunan di masyarakat Jawa memiliki filosofinya sendiri. Misalnya, filosofi bentuk atap bangunan tradisional Jawa menggambarkan gunung sebagai sesuatu yang suci. Perwujudan gunung dalam bangunan tradisional masyarakat Jawa dapat dilihat dari bentuk tajug, joglo, limasan, dan kampung. Struktur bangunan atap ditopang dengan saka (tiang). Bangunan utama penyangga atap dikenal sebagai "saka guru".

Di zaman sekarang, arsitektur menghadapi banyak tantangan, mulai dari cepatnya proses urbanisasi hingga masalah perubahan iklim. Arsitek perlu menciptakan rancangan yang dapat memenuhi kebutuhan kompleks masyarakat perkotaan dengan tetap mempertahankan daya tarik visual. Globalisasi telah membawa homogenisasi dalam dunia arsitektur, yang berpotensi menghapuskan identitas lokal. Oleh sebab itu, sangat penting bagi arsitek untuk mencari keseimbangan antara penerapan teknologi terbaru dan pelestarian nilai budaya. Pada dasarnya, bangunan tradisional tidak sepenuhnya mengalami perubahan atau mengikuti perkembangan kemajuan teknologi bangunan.

1.2 Pendopo

Ornamen tradisional seperti ukiran kayu dan ragam hias di tiang atau dinding pendopo menunjukkan eratnya hubungan antara budaya lokal dan agama. Hanya saja ornamen ini tidak hanya bertujuan estetika, tetapi juga menyampaikan simbol yang bermakna. Dalam konteks modernisasi, pendopo mengalami perubahan, baik dari segi fungsi maupun desain. Meskipun bentuk tradisional masih digunakan, material modern dan fungsi baru, seperti ruang untuk acara formal atau fasilitas umum semakin digunakan (Hidayatun, 1999: 33). Oleh karena itu, pendopo sebagai elemen arsitektur tradisional yang dapat beradaptasi tanpa mengorbankan nilai-nilai inti yang diwariskan turun-temurun.

Pendopo adalah salah satu bagian terpenting dalam arsitektur tradisional Jawa yang mencerminkan nilai-nilai budaya, sosial dan filsafat masyarakat setempat. Di era kerajaan Hindu-Buddha, seperti Majapahit, pendopo berfungsi sebagai pusat di kerajaan, termasuk upacara adat dan pertemuan penting. Tidak hanya berfungsi sebagai ruang fisik.

1.3 Budaya

Budaya adalah sistem nilai, norma, tradisi, keyakinan, dan praktik sosial yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam suatu masyarakat. Kluckhohn dan Kroeber pada tahun 1952

mengartikan budaya sebagai “pola terpadu dari pengetahuan, keyakinan, dan perilaku manusia”, mencakup semua aspek yang dipelajari oleh manusia dalam konteks sosial mereka. Penjelasan ini menunjukkan bahwa budaya tidak hanya mencerminkan warisan dari masa lalu, tetapi juga menjadi dasar bagi manusia untuk memahami dunia beradaptasi di dalam masyarakat dan lingkungan yang lebih luas. Transformasi budaya adalah sebuah fenomena yang tidak bisa dihindari, terutama di zaman globalisasi. Globalisasi telah membawa arus informasi, teknologi, dan nilai-nilai baru yang mempercepat terjadinya perubahan budaya.

Berkaitan dengan budaya dan komponennya yang umum. Setiap daerah, wilayah, dan negara memiliki kebudayaan yang berbeda-beda, baik dari segi bahasa, pakaian, cara komunikasi, dan kebiasaan masyarakat yang sering dilakukan. Letak geografis suatu wilayah, serta sumber daya alam dan sumber daya manusianya, tentu juga mempengaruhi perbedaan kebudayaan dan unsur-unsurnya (Mahfudlah Fajrie, 2016: 14).

Dengan beragamanya wujud budaya lokal, kita memiliki kesempatan untuk mempelajari kearifan lokal sebagai cara untuk menangani masalah yang pernah kita hadapi. Namun, kearifan lokal ini sering kali diabaikan, dianggap tidak relevan dengan apa pun yang terjadi saat ini, apalagi dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Akibatnya, banyak warisan budaya yang telah lapuk, terlantar, atau bahkan dilecehkan keberadaannya. Padahal banyak negara yang tidak memiliki sejarah yang kuat malah mencari jati diri dari tinggalan sejarah dan warisan budaya yang sedikit. Negara kita sendiri yang memiliki banyak warisan budaya, justru mengabaikan aset yang sangat penting ini.

2. SEJARAH PERKEMBANGAN PENDOPO DIPOKUSUMO

Nama “Purbalingga” diyakini berasal dari perpaduan dua unsur penting, yaitu kata “purba” dan “lingga” yang merujuk pada peninggalan masa lalu berupa simbol-simbol Siwaistis (lingga) dalam arkeologi lokal. Penamaan ini dimaksudkan untuk membedakan dari “Probolinggo” di Jawa Timur yang memiliki kemiripan bunyi. Legenda lokal turut memperkuat identitas ini melalui tokoh Purbasena dan Linggasena, sehingga nama “Purbalingga” menjadi penegas warisan spiritual dan historis yang melekat

Perkembangan administratif Kabupaten Purbalingga erat kaitannya dengan dinamika politik pada masa Kasunanan Surakarta. Pada masa pemerintahan Susuhunan Amangkurat II (1677–1703), terjadi pemberontakan oleh Kyai Wanakusuma dan dua saudaranya, yang menuntut pemenuhan janji Ki Ageng Pemanahan kepada Ki Ageng Giring. Pemberontakan tersebut menjadi bagian penting dari pembentukan struktur pemerintahan lokal yang berlanjut dengan penunjukan Ki Arsakusuma sebagai Raden Tumenggung Dipoyudo III. Atas arahan Ki Arsantaka, pusat pemerintahan dipindah dari Karanglewas ke Desa Purbalingga karena dinilai lebih strategis dan subur. Pembangunan alun-alun, pendopo pemerintahan, dan kantor kabupaten dilakukan pada 23 Juli 1759. Sejak saat itu, Purbalingga resmi menjadi kabupaten yang berdiri sendiri di bawah otoritas pemerintahan pusat Surakarta (Triatmo, 2008: 43).

Kalau kita melihat catatan sejarah, memang Dipayuda yang pertama itu gugur dalam Perang Jenar, kemudian digantikan Di Payuda kedua yang wafat karena sakit. Setelah itu, patihnya yang bernama Arsakusuma diangkat sebagai Di Payuda ketiga. Dialah yang kemudian memindahkan pusat pemerintahan dari Karanglewas ke sebuah desa yang kini kita kenal sebagai Purbalingga. Di sinilah Pendopo itu mulai didirikan.

Pendopo Dipokusumo kemungkinan besar dibangun pada masa pemerintahan Dipayuda III (Arsapusuma) sekitar tahun 1830 yang sebelumnya di beri nama Pendopo Kabupaten, bertepatan dengan era awal pembentukan identitas administratif Kabupaten Purbalingga di bawah sistem Inlandsch Bestuur (pemerintahan pribumi) yang diterapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Sistem ini memanfaatkan figur tradisional seperti bupati untuk menjalankan kekuasaan kolonial secara tidak langsung

Sedangkan, nama “Pendopo Dipokusumo” mulai digunakan secara resmi pada masa pemerintahan Bupati Triono Budi Sasongko sekitar tahun 2000–2010. Nama tersebut merujuk pada gelar kebangsawanan yang diberikan kepada para Bupati Purbalingga, mulai dari Raden Tumenggung Dipokusumo I (DiPayuda III) hingga Dipokusumo VI. Gelar tersebut menegaskan legitimasi kekuasaan lokal yang masih memiliki akar dalam struktur kerajaan Mataram, dan tetap dihormati meski telah berada di bawah pengaruh pemerintahan kolonial maupun pemerintahan Republik Indonesia

Penempatan pendopo yang berdampingan dengan masjid agung dan alun-alun itu bukan kebetulan. Itu bagian dari strategi pemerintah kolonial yang sebenarnya meniru penataan kota dari kerajaan- kerajaan Jawa, supaya tetap terlihat sah di mata masyarakat lokal.

Hingga era reformasi, pendopo ini masih berfungsi aktif dan relevan, mencerminkan bagaimana unsur tradisional seperti pendopo tetap bisa diintegrasikan dalam sistem pemerintahan modern. Hal ini menjadikan Pendopo Dipokusumo bukan hanya untuk mengenang bangunan sejarah Jawa saja, tetapi juga simbol kontinuitas administratif dan identitas budaya pemerintahan lokal Jawa yang tetap hidup dan berpartisipasi dalam perkembangan zaman. Meskipun ada peralihan dari pemerintahan kolonial ke republik, beberapa elemen dalam struktur pemerintahan lokal, seperti penggunaan bangunan tradisional (pendopo), tetap relevan dan penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang efisien (Purwonto, 2012: 120).

Pendopo Dipokusumo tidak hanya menjadi pusat kegiatan pemerintahan, tetapi juga ruang yang aktif menyelenggarakan berbagai acara budaya dan edukasi. Pemanfaatan bangunan bersejarah sebagai sarana edukasi dan budaya, seperti yang dilakukan Pendopo Dipokusumo, membantu menjaga nilai-nilai sejarah dan budaya lokal, sekaligus menjadi tempat berkembangnya gagasan-gagasan baru (Sutiyono, 2018: 50).

3. ARSITEKTUR JAWA PENDOPO DIPOKUSUMO

Pendopo mencerminkan keselarasan antara manusia dengan alam semesta dan Tuhannya. Struktur terbuka, tiang-tiang penyangga (saka), serta orientasi bangunan menunjukkan keterhubungan antara dunia mikrokosmos (manusia) dan makrokosmos (alam semesta). Pendopo Dipokusumo sebagai bagian dari kompleks rumah dinas Bupati Kabupaten Purbalingga dibangun dengan memperhatikan prinsip-prinsip keselarasan antara manusia dengan alam semesta dan Tuhannya. Tata letaknya mengikuti pola tradisional catur gatra tunggal pendopo, masjid, alun-alun, dan pasar yang merupakan konsep penataan kota khas Jawa. Pendopo Dipokusumo merupakan representasi kuat dari arsitektur tradisional Jawa, Khususnya tipe Joglo yang menonjolkan struktur atap bertingkat empat.

Pendopo Dipokusumo merupakan representasi kuat dari arsitektur tradisional Jawa, Khususnya tipe Joglo yang menonjolkan struktur atap bertingkat empat. Sejarah mencatat bahwa pendirian Pendopo Dipokusumo berhubungan erat dengan perkembangan pemerintahan lokal Kabupaten Purbalingga sebagai pusat kegiatan administrasi dan sosial. Bangunan ini menggunakan sistem saka guru, yaitu empat tiang pokok dari kayu jati pilihan yang menopang atap besar berbentuk limasan bertingkat. Filosofi saka guru melambangkan keseimbangan antara empat penjuru mata angin serta keterhubungan manusia dengan alam dan sang pencipta (Mahardika, 2020: 40-41).

Bangunan ini menggunakan sistem saka guru, yaitu empat tiang pokok dari kayu jati pilihan yang menopang atap besar berbentuk limasan bertingkat. Filosofi saka guru melambangkan keseimbangan antara empat penjuru mata angin serta keterhubungan manusia dengan alam dan sang pencipta (Mahardika, 2020: 40-41). Struktur bangunan utama terdiri atas : 1) Atap Joglo, Terletak pada susunan struktur rangka atap berujung (bentuk piramida terbalik, yaitu semakin ke atas semakin melebar dan terletak di atas ke empat tiang disusun bertingkat sampai dengan posisi, dan susunan rangka atap berbentuk piramida yang disusun di atas ke empat tiang besar ke arah bagian dalam; 2) Saka Guru, empat tiang utama yang menopang seluruh beban 58 struktur atap. Tiang-tiang ini terletak di tengah bangunan dan menjadi inti kekuatan konstruksi; 3) Tumpang Sari, balok-balok kayu yang disusun bertingkat di atas saka guru, menyerupai piramida bertumpuk; 4) Cagak, tiang-tiang penyangga tambahan selain saka guru, yang berfungsi memperkuat struktur horizontal dan menopang beban atap bagian luar; 5) Tanpa Dinding, menciptakan kesan luas, sejuk, dan menyatu dengan lingkungan sekitar; 6) Tutup Keong, bagian penutup ujung atap yang berbentuk segitiga dan berfungsi sebagai elemen penyekat antara bagian atap atas dan bawah..

Handayani dan Susanti (2022: 1411–8912) menyebutkan bahwa adaptasi ruang dalam arsitektur tradisional Jawa selalu mengikuti prinsip keharmonisan antara fungsi, bentuk, dan nilai budaya. beberapa bangunan tambahan di sekitar Pendopo Dipokusumo diantaranya : 1) Pringgitan, ruang transisi antara pendopo (ruang publik) dan dalem (ruang privat).; 2) Dalem, inti dari keseluruhan kompleks bangunan, berfungsi sebagai ruang pribadi pejabat, ruang istirahat, ruang rapat terbatas, serta tempat penyimpanan dokumen penting pemerintahan.; 3) Gendhok (Gandhok), Fungsi utamanya adalah sebagai ruang kerja staf administrasi, kamar tamu resmi, serta ruang penyimpanan alat tradisional seperti gamelan, keris, atau dokumen arsip; 4) Sentong, sentong terdiri dari tiga bagian diantara sentong tengen (kanan) sentong kiwo (kiri) dan sentong Tengah; 5) Ruang Gamelan, Ruang khusus untuk penyimpanan gamelan merupakan bagian penting dalam kompleks pendopo, karena alat musik tradisional Jawa ini bukan hanya sarana hiburan, tetapi juga komponen sakral dalam setiap upacara adat dan penyambutan resmi.

ornamen-ornamen tersebut tidak hanya dimaknai sebagai ekspresi estetika tetapi juga sebagai penjaga energi ruang. Dalam kepercayaan lokal, beberapa motif ukiran dipercaya mampu menangkal energi buruk dan menjaga harmoni antara dunia fisik dan spiritual. Fungsi simbolik lainnya adalah sebagai penghubung antara generasi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Melalui ornamen, masyarakat Purbalingga mengekspresikan identitas dan kebanggaan akan warisan budaya leluhurnya. Pendopo menjadi ruang naratif yang menceritakan kisah, harapan, dan nilai-nilai luhur secara visual

Keberadaan ornamen dalam arsitektur tradisional Jawa tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai budaya dan spiritual masyarakat yang melahirkannya. Pada Pendopo Dipokusumo, setiap detail ornamen mengandung makna simbolik yang mencerminkan identitas, filsafat hidup, serta hubungan kosmis antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Ornamen bukan sekadar hiasan estetis, melainkan bentuk komunikasi visual yang sarat pesan moral dan spiritual.

Motif khas Pendopo Dipokusumo, yakni lung ngrembaka, menambah kekayaan ornamen lokal. Motif ini tidak hanya menghiasi tiang dan bagian langit-langit, tetapi juga memberi makna mendalam tentang pertumbuhan, kebaikan, dan kelestarian. Lung yang berarti tunas melambangkan harapan dan potensi, sedangkan ngrembaka

mengandung makna perkembangan positif dalam kehidupan individu dan masyarakat. Hal ini menunjukkan semangat progresif masyarakat Jawa yang tetap berakar pada tradisi.

Pendopo Dipokusumo juga mempunyai ciri khas di setiap Tumpang sari, Saka Guru yang Dimana pemberian warna emas di setiap ukiran kayunya. Warna emas dalam budaya Jawa sering dikaitkan dengan unsur kemuliaan, kehormatan, dan status sosial tinggi.

Pendopo Dipokusumo bukan hanya menjadi artefak sejarah, melainkan juga menjadi contoh nyata keberhasilan adaptasi modern dan konservasi budaya yang bijak dan berkelanjutan. Perpaduan antara struktur tradisional yang tetap dijaga dan unsur-unsur modern yang ditambahkan secara selektif menunjukkan bahwa warisan budaya tidak harus statis, melainkan dapat berkembang tanpa kehilangan jati dirinya.

4. PENDOPO DIPOKUSUMO SEBAGAI CERMINAN IDENTITAS BUDAYA JAWA

Pendopo Dipokusumo yang terletak di Purbalingga, Jawa Tengah, merupakan bangunan yang memiliki hubungan erat dengan nilai-nilai budaya Jawa, mencerminkan norma budaya dan sosial yang lebih luas di wilayah tersebut, Sebagai sebuah pendopo bangunan tradisional Jawa. Bangunan ini tidak hanya berfungsi sebagai struktur arsitektural, tetapi juga menjadi simbol budaya yang merepresentasikan berbagai aspek kehidupan dan filsafat masyarakat Jawa. Pendopo Dipokusumo memperlihatkan bagaimana sebuah bangunan tradisional dapat mengartikulasikan identitas budaya melalui peran sosial, estetika, serta nilai-nilai spiritual yang diwariskan secara turun-temurun.

Salah satu nilai inti yang tercermin dalam Pendopo Dipokusumo adalah filosofi Jawa Memayu Hayuning Bawana, yang menekankan pentingnya menjaga harmoni dengan lingkungan. Filosofi ini menjadi dasar yang mempengaruhi desain dan pemanfaatan berbagai struktur tradisional Jawa, termasuk pendopo (Ali Ikhsan et al., 2018: 7). Pengaruh filosofi tersebut dapat dilihat dalam tata ruang pemukiman Jawa yang memperhatikan keseimbangan ekologis dan spiritual. Pendopo Dipokusumo sendiri dibangun dan digunakan dengan prinsip ini, sehingga berfungsi tidak hanya sebagai pusat aktivitas sosial tetapi juga sebagai wujud keseimbangan kosmis yang diyakini oleh masyarakat Jawa.

Menurut Ali Ikhsan dkk (2018: 7), desain dan pemanfaatan ruang dalam pendopo tidak terlepas dari prinsip kosmologi Jawa yang selalu mengedepankan hubungan manusia dengan alam dan Tuhan. Pendopo yang tidak memiliki dinding menggambarkan sifat keterbukaan dan egalitarianisme masyarakat Jawa. Atap Joglo dengan susunan tumpang sari juga merepresentasikan hirarki spiritual, dari bumi ke langit, dari manusia biasa hingga leluhur dan Tuhan. Ini menjadikan pendopo tidak sekadar bangunan, tetapi sebagai media simbolik yang mencerminkan pandangan hidup masyarakatnya

Nilai-nilai sosial yang diwujudkan melalui Pendopo Dipokusumo meliputi tepo seliro (toleransi), andap asor (rendah hati), sabar, rukun, dan gotong royong. Nilai-nilai ini tidak hanya tampak dalam bentuk kegiatan budaya yang diselenggarakan, tetapi juga dalam perilaku masyarakat yang berinteraksi di lingkungan pendopo. Misalnya, dalam acara kebudayaan, tidak ada pemisahan kelas sosial yang kaku, semua masyarakat diundang dan diberi tempat untuk berpartisipasi, mencerminkan nilai egalitarianisme yang dijunjung masyarakat Jawa.

Pendopo Dipokusumo juga menjadi simbol bagaimana tradisi dan modernitas dapat berjalan berdampingan. Meskipun berada di tengah kota yang mengalami perkembangan pesat, pendopo tetap dijaga kelestariannya dan dirawat secara berkala. Penggunaan teknologi modern dalam dokumentasi kegiatan budaya, pencahayaan, hingga sistem suara, justru memperkuat fungsi pendopo sebagai ruang yang adaptif namun tidak kehilangan identitas.

Hubungan yang erat antara Pendopo Dipokusumo dengan masyarakat tidak hanya terbatas pada partisipasi dalam kegiatan formal dan informal, tetapi juga dalam bentuk keterlibatan emosional dan simbolis. Bagi masyarakat Purbalingga, pendopo ini bukan hanya bangunan pemerintahan, tetapi juga representasi dari identitas daerah. Ia menjadi tempat yang sarat kenangan, baik pribadi maupun kolektif. Banyak warga yang memiliki pengalaman langsung atau tidak langsung dengan kegiatan yang digelar di pendopo, mulai dari perayaan hingga forum diskusi publik. Seiring waktu, pendopo membentuk ruang sosial yang mampu memelihara memori kolektif warga Purbalingga.

Dengan segala fungsi dan maknanya, jelas bahwa Pendopo Dipokusumo bukan hanya menjadi warisan masa lalu, tetapi juga ruang kontemporer yang terus dimaknai ulang oleh masyarakat. Upaya pelestarian yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan komunitas warga menunjukkan bahwa kebudayaan Jawa, dengan nilai-nilainya yang luhur seperti tepo seliro, rukun, gotong royong, dan andhap asor, masih hidup dan dinamis dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Purbalingga, dan salah satu ruang vital untuk mempertahankannya adalah pendopo.

Pendopo juga memainkan peran strategis dalam menjaga kohesi sosial. Di tengah tantangan zaman seperti perpecahan sosial atau pengaruh negatif media sosial, keberadaan pendopo sebagai ruang tatap muka dan interaksi nyata menjadi krusial. Forum-forum seperti sarasehan kebangsaan, diskusi lintas agama, dan rembug warga membuktikan bahwa pendopo masih menjadi arena deliberatif yang mengutamakan dialog, mendengar, dan mencari solusi bersama secara damai (Purwanto, 2012: 120).

Keterkaitan terhadap situs bersejarah seperti pendopo dapat memediasi hubungan antara rasa keterikatan masyarakat dan keterlibatan kewargaan. Koneksi emosional warga terhadap landmark semacam ini dapat mendorong perilaku pro-lingkungan dan keterlibatan aktif dalam pemerintahan lokal, memperkuat kohesi dan partisipasi masyarakat (Buta et al., 2014: 6). Selain itu, mendorong partisipasi kewargaan melalui kegiatan dan acara yang terorganisir di pendopo dapat memperkuat ikatan sosial masyarakat dan memupuk rasa kebersamaan yang bertanggung jawab.

Hubungan antara Pendopo Dipokusumo dan masyarakat Purbalingga bersifat timbal balik dan berkelanjutan. Masyarakat menjadikan pendopo sebagai bagian dari kehidupan sosial-budaya mereka, sementara pendopo hadir sebagai ruang representasi budaya, pusat aktivitas publik, sekaligus instrumen pembangunan identitas lokal. Simbiosis ini memperlihatkan bagaimana warisan budaya tidak sekadar dilestarikan, tetapi dihidupkan kembali melalui partisipasi aktif dan kolaborasi semua pihak.

Pendopo Dipokusumo bukan hanya struktur fisik dengan nilai historis, tetapi juga menjadi pusat kehidupan sosial, simbol identitas, ruang demokrasi lokal, panggung budaya, dan sarana edukatif yang hidup dan terus berkembang bersama masyarakat Purbalingga.

5. SIMPULAN

Dalam historiografi lokal, kabupaten Purbalingga sering dikaitkan dengan banyak peristiwa sejarah, seperti situs arkeologi, tradisi, dan peranannya dalam perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. Pendopo Dipokusumo adalah simbol dari nilai-nilai budaya yang ada dalam kehidupan masyarakat. Bangunan pendopo memiliki peranan yang penting dalam aktivitas harian masyarakat setempat. Globalisasi telah membawa homogenisasi dalam dunia arsitektur, yang berpotensi menghapuskan identitas lokal. Oleh sebab itu, sangat penting bagi arsitek untuk mencari keseimbangan antara penerapan teknologi terbaru dan pelestarian nilai budaya. Oleh karena itu, pendopo sebagai elemen arsitektur tradisional yang dapat beradaptasi tanpa mengorbankan nilai-nilai inti yang diwariskan turun-temurun. Namun, kearifan lokal ini sering kali diabaikan, dianggap tidak relevan dengan apa pun yang terjadi saat ini, apalagi dengan apa yang akan terjadi di masa depan.

Pada masa pemerintahan Susuhunan Amangkurat II (1677–1703), terjadi pemberontakan oleh Kyai Wanakusuma dan dua saudaranya, yang menuntut pemenuhan janji Ki Ageng Pemanahan kepada Ki Ageng Giring. Pemberontakan tersebut menjadi bagian penting dari pembentukan struktur pemerintahan lokal yang berlanjut dengan penunjukan Ki Arsakusuma sebagai Raden Tumenggung Dipoyudo III. Penempatan pendopo yang berdampingan dengan masjid agung dan alun-alun itu bukan kebetulan. Itu bagian dari strategi pemerintah kolonial yang sebenarnya meniru penataan kota dari kerajaan- kerajaan Jawa, supaya tetap terlihat sah di mata masyarakat lokal.

Pendopo mencerminkan keselarasan antara manusia dengan alam semesta dan Tuhannya. Struktur terbuka, tiang-tiang penyangga (saka), serta orientasi bangunan menunjukkan keterhubungan antara dunia mikrokosmos (manusia) dan makrokosmos (alam semesta). Pendopo Dipokusumo juga mempunyai ciri khas di setiap Tumpang sari, Saka Guru yang Dimana pemberian warna emas di setiap ukiran kayunya. Warna emas dalam budaya Jawa sering dikaitkan dengan unsur kemuliaan, kehormatan, dan status sosial tinggi.

Hubungan yang erat antara Pendopo Dipokusumo dengan masyarakat tidak hanya terbatas pada partisipasi dalam kegiatan formal dan informal, tetapi juga dalam bentuk keterlibatan emosional dan simbolis. Bagi masyarakat Purbalingga, pendopo ini bukan hanya bangunan pemerintahan, tetapi juga representasi dari identitas daerah. Ia menjadi tempat yang sarat kenangan, baik pribadi maupun kolektif. Banyak warga yang memiliki pengalaman langsung atau tidak langsung dengan kegiatan yang digelar di pendopo, mulai dari perayaan hingga forum diskusi publik. Seiring waktu, pendopo membentuk ruang sosial yang mampu memelihara memori kolektif warga Purbalingga.

REFERENSI

- Ali Ikhsan, F., Setioko, B., & Suprpti, A. (2018). Ecological wisdom of Hindu-Javanese community settlement in Cetho Hamlet, Lawu Mountains, Central Java, Indonesia. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 99(1).
- Atmo, T. (2008). *Kilas Sejarah Purbalingga*.
- Buta, N., Holland, S. M., & Kaplanidou, K. (2014). Local communities and protected areas: The mediating role of place attachment for pro- environmental civic engagement. *Journal of Outdoor Recreation and Tourism*, 5–6, 1–10.
- Hidayatun, M. (1999, January). Pendopo Dalam Era Modernisasi : Bentuk Fungsi dan Makna Pendopo pada Arsitektur Tradisional Jawa dalam Perubahan Kebudayaan. *Architecture and Built Environment*, Petra Christian University.

- Koentjaraningrat. (1974). *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT
- Koentjaraningrat. (1984). *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mahardika, I. P. (2020). *Komunikasi Budaya Dalam Rumah Adat sebagai arsitektur Berkelanjutan di Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng. Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singsaraja*, Vol. 1 No.1.
- Purwonto, H. (2012). *Sejarah Sosial Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Rancang Sari Handayani, F. T. (2022). *Karakteristik Arsitektur Vernakular Pada Bangunan Pendopo Ageng Taman Budaya Jawa Tengah*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1411-8912.
- Rengkung, J. (2011). *Arsitektur Vernakular Rumah Tinggal Masyarakat Etnik Minahasa*. Media Matrasain, Vol 8, No 3.
- Sukma, A. B. (2017). *Perkembangan dan Fungsi Museum Prof.DR.Soegarda Poerbakawtja Sebagai Tempat Pelestarian Benda- Benda Bersejarah Kabupaten Purbalingga 2003-2016*.
- Sutiyono, B. (2018). "Pemanfaatan Bangunan Bersejarah Sebagai Sarana Edukasi: Studi Kasus Pendopo Kabupaten Purbalingga." *Jurnal Warisan Budaya Nusantara*, 5(2), 111-120.